

TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA CIGOMBONG

Aqsho Bintang Nusantara¹, Muahmmad Ramadhan², Muhammad Tegar Purna
Bhakti ³, Roberta Ayunita⁴, Muhammad Jalaludin Assayuti⁵, Agra Alfin Zulfa⁶,
Gotfridus Goris Seran⁷, neng Virly Aprilliayani.

Universitas Djuanda Bogor fidelaqsho@gmail.com¹, muhamadramadhannn165@gmail.com²
, mtegarpb@gmail.com³, mjalaludinassayuti2@gmail.com⁵, agraalfinzulfaa@gmail.com⁶,
ggseran@unida.ac.id⁷, neng.virly@unida.ac.id⁸.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini memiliki potensi besar dalam pertanian dan pariwisata, tetapi pendapatan masyarakat masih tergolong rendah. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan BUMDes berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan aset, pelayanan jasa, dan usaha lainnya. Faktor-faktor ekologi administrasi seperti ketersediaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan memengaruhi tata kelola BUMDes dengan menentukan jenis kegiatan yang dapat dilakukan serta kebijakan pengelolaan sumber daya. Interaksi antara pemerintah desa, masyarakat lokal, dan lingkungan juga mempengaruhi tata kelola BUMDes, termasuk koordinasi kebijakan lingkungan dan promosi kesadaran lingkungan untuk mendukung praktik berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola BUMDes yang baik dan berkelanjutan dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Strategi peningkatan tata kelola berkelanjutan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, pengembangan program pelatihan tentang praktik berkelanjutan, dan pemberian insentif untuk usaha ramah lingkungan.

Kata Kunci: Tata kelola, BUMDes, Ekologi administrasi, Desa Cigombong

PENDAHULUAN

Sumber daya alam Indonesia tersebar di seluruh negara, menjadikannya salah satu negara yang paling kaya. Kekayaan alam ini harus dapat berfungsi sebagai kapital kuat untuk pembangunan berkelanjutan wilayah. Setiap daerah memiliki kebebasan untuk memaksimalkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada,

terutama dalam konteks otonomi daerah. Sumber daya sebenarnya memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat yang sangat besar jika dikelola dengan baik.

mendefinisikan tata kelola publik sebagai “keseluruhan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan publik di suatu negara, dimana badan atau lembaga publik memulai proses tersebut atau setidaknya terlibat sebagian dalam proses tersebut.

Tata kelola publik menekankan: (a) arah diukur berdasarkan visi strategis, (b) legitimasi dan suara diukur berdasarkan orientasi konsensus, partisipasi, dan inklusivitas. Kedua, pengambilan keputusan/kebijakan mengacu pada bagaimana keputusan/kebijakan itu dibuat. Tata kelola publik menekankan kinerja yang diukur berdasarkan daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme. Ketiga, interaksi mengacu pada bagaimana hubungan antar aktor dibangun. Tata kelola publik menekankan pada: (a) kolaborasi yang diukur berdasarkan kemitraan dan jaringan, (b) akuntabilitas diukur berdasarkan akuntabilitas dan transparansi, (c) keadilan diukur berdasarkan keadilan dan supremasi hukum.(Hanafiah et al., 2021).

Wilayah terkecil dalam suatu negara yang paling dekat dengan masyarakat dan secara langsung mendukung kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup disebut desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai struktur politik yang menjunjung tinggi dan melindungi hak adat, hak asal usul, dan/atau hukum desa. Desa adalah kumpulan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak asal usul. Desa mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup melalui pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik sebagai wakil negara.

Desa adalah bagian terkecil dari negara yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki akses langsung ke kebutuhan hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014), desa adalah kelompok masyarakat yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa, sebagai wakil negara, memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan melalui pembangunan fisik dan sumber daya manusia.

Cigombong adalah desa yang terletak di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini memiliki banyak potensi, baik dalam pertanian maupun pariwisata. Sebagian besar orang di desa Cigombong adalah petani dengan pendapatan rendah. Pada awalnya, Desa Cigombong hanya menghasilkan kurang dari 20 juta dolar per bulan. Pemerintah desa berpikir untuk mengembangkan usaha karena pendapatan yang rendah. Akhirnya, pemerintah dan warga setuju untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. Meskipun BUMDes sebenarnya sudah ada sebelum UU Desa. Meskipun demikian, keberadaannya semakin strategis karena fungsinya sebagai penyokong ketahanan ekonomi desa.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, BUMDes merupakan badan komersial yang didirikan untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa memiliki modal seluruhnya atau terutama melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan masyarakat yang mandiri. Dukungan pemerintah terhadap hal ini semakin besar, terlihat dari PP Nomor 47 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menggerakkan pembangunan dan mengelola sumber daya.

Tujuan dari penelitian ini penulis ingin mengetahui tata Kelola badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten bogor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif, yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena mengenai pengalaman subjek penelitian. Penelitian ini

mendapatkan hasil data deskriptif yang terdiri dari kata-kata lisan dan tulisan dari individu serta perilaku yang diamati. Alasan penggunaan pendekatan ini adalah karena masalah yang diteliti belum jelas, bersifat holistik, kompleks, dinamis, dan sarat makna, sehingga tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data melalui metode penelitian kuantitatif. (Moh. Pabundu Tika, 2020). Adapun lokasi penelitian tentang Kebijakan Publik untuk Impelentasi perda nomor 11 tahun 2005 mengenai transformasi Pasar Tradisional ke Pasar Modern. ini dilakukan tepatnya di daerah Pasar Cikereteg. Penelitian ini menggunakan sumber data seperti catatan lapangan dan transkrip wawancara yang didokumentasikan secara tertulis. Penelitian kualitatif ini mencakup jenis data seperti catatan lapangan, dokumentasi dan hasil wawancara.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yang terdiri dari 2 kategori:

1. Data Primer, merupakan data yang didapat dari informan lewat observasi dan wawancara, seperti yang dilakukan terhadap PD Pasar dan pedagang di lingkungan pasar.
2. Data Sekunder, ialah data yang didapat melalui observasi, referensi, studi kepustakaan, dan dokumen yang dikumpulkan dari lokasi penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner yang diberikan kepada Pegawai desa Cigombong, serta masyarakat.

1. Metode Dokumen Metode ini melibatkan penggunaan dokumen yang ada serta pengamatan langsung terhadap subjek penelitian.
2. Metode Wawancara Wawancara dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan langsung kepada beberapa responden. (pegawai Desa Cigombong).

3. Dokumentasi Dengan kata lain, semua data yang dikumpulkan secara langsung dari referensi yang membahas subjek penelitian dicatat, termasuk keterangan atau kondisi objektif tentang lokasi dan sampel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor ekologi administrasi seperti ketersediaan sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan, dan pemahaman akan ekosistem lokal memengaruhi tata kelola BUMDes di Desa Cigombong dengan menentukan jenis kegiatan yang dapat dilakukan, memengaruhi kebijakan pengelolaan sumber daya, dan mengharuskan adopsi praktik administrasi yang berkelanjutan.

Peran interaksi antara pemerintah desa, masyarakat lokal, dan lingkungan dalam memengaruhi tata kelola BUMDes di Desa Cigombong mencakup koordinasi dalam penetapan kebijakan lingkungan, partisipasi dalam program pengelolaan sumber daya alam, dan promosi kesadaran lingkungan untuk mendukung praktek berkelanjutan.

Hubungan antara keberlanjutan ekologis dan efisiensi administratif dalam tata kelola BUMDes Desa Cigombong tercermin dalam pengelolaan yang lebih terencana terhadap sumber daya alam, pengurangan biaya operasional melalui praktik berkelanjutan, dan peningkatan produktivitas melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Praktek-praktek tata kelola BUMDes yang memperhatikan aspek keberlanjutan ekologis di Desa Cigombong mencakup penggunaan energi terbarukan, promosi pertanian organik, pembangunan infrastruktur hijau, dan pengelolaan air yang efisien.

Strategi untuk meningkatkan tata kelola BUMDes yang berkelanjutan secara ekologis di Desa Cigombong melibatkan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, pengembangan program pelatihan

tentang praktik berkelanjutan, dan penerapan insentif untuk usaha-usaha yang ramah lingkungan.

Arah Diukur Berdasarkan Visi Strategis

Visi Strategi dalam mewujudkan bumdes di desa cigombang mengarahkan masyarakat nya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, pengukuran arah visi dan strategi dalam mengembangkan badan usaha milik desa, bpd selaku pengelola badan usaha milik desa di cigombang selalu melaksanakan implementasi dan monitoring kepada masyarakat serta penyesuaian dan pengembangan terhadap badan usaha milik daerah (BUMDes)

Legitimasi dan Suara Diukur Berdasarkan Orientasi Konsensus, Partisipasi, dan Inklusivitas

Legitimasi merujuk pada penerimaan dan pengakuan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap keberadaan dan tindakan organisasi, kegiatan orientasi konsensus dan partisipasi masyarakat yang besar untuk kemajuan badan usaha milik desa di desa cigombang. Memastikan badan usaha milik desa dapat di jangkau oleh berbagai kelompok dan komunitas dan menyediakan seluruh informasi yang dapat di akses oleh masyarakat. Adapun pengukuran legitimasi dan suara pbd melalui survei dan kuesioner untuk mengukur dan persepsi anggota masyarakat terhadap BUMDes, serta mengadakan forum dan diskusi terbuka untuk mendengarkan pendapat masyarakat, Adapun evaluasi berkala yang di lakukan oleh pbd selama tiga bulan sekali (Triwulan).

Kolaborasi yang Diukur Berdasarkan Kemitraan dan Jaringan

Kolaborasi yang di lakukan oleh pbd dalam membangun badan usaha milik desa di cigombang berkolaborasi dengan aparat desa serta mitra untuk mencapai tujuan bersama, hasil dari kolaborasi yang dilakukan oleh pbd, aparat desa serta mitra menghasilkan kesejahteraan masyarakat di desa cigombang

Akuntabilitas yang Diukur Berdasarkan Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dalam BUMDes berarti bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta mampu memberikan penjelasan dan laporan yang jelas kepada pemangku kepentingan, Transparansi merujuk pada keterbukaan dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Keadilan yang Diukur Berdasarkan Keadilan dan Supremasi Hukum

Keadilan dalam BUMDes berarti memperlakukan semua anggota masyarakat secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Supremasi hukum merujuk pada penerapan hukum yang adil dan konsisten dalam semua aspek operasional BUMDes di desa cigombong

KESIMPULAN

Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cigombong yang kaya sumber daya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, yang menjadi subjek penelitian ini. Perekonomian desa ini sebagian besar masih bertumpu pada pertanian dan pariwisata, meskipun pendapatan per kapitanya masih kecil. Melalui pengelolaan aset, jasa, dan perusahaan lainnya, BUMDes terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Variabel ekologi administratif mempengaruhi tata kelola BUMDes melalui pendiktean jenis kegiatan yang dapat dilakukan dan kebijakan pengelolaan sumber daya. Contoh unsur tersebut adalah kelestarian lingkungan hidup dan ketersediaan sumber daya alam.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya interaksi antara pemerintah desa, masyarakat lokal, dan lingkungan dalam mempengaruhi tata kelola BUMDes, termasuk koordinasi kebijakan lingkungan dan promosi kesadaran lingkungan untuk mendukung praktik berkelanjutan. Hubungan antara keberlanjutan ekologis dan

efisiensi administratif terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih terencana, pengurangan biaya operasional melalui praktik berkelanjutan, dan peningkatan produktivitas dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Praktik tata kelola BUMDes di Desa Cigombang yang memperhatikan keberlanjutan ekologis mencakup penggunaan energi terbarukan, promosi pertanian organik, pembangunan infrastruktur hijau, dan pengelolaan air yang efisien. Strategi peningkatan tata kelola berkelanjutan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, pengembangan program pelatihan tentang praktik berkelanjutan, dan pemberian insentif untuk usaha ramah lingkungan. Akuntabilitas dan transparansi dijaga melalui keterbukaan informasi dan pelaporan, sementara keadilan dan supremasi hukum dijamin dengan memperlakukan semua anggota masyarakat secara adil dan konsisten. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola BUMDes yang baik dan berkelanjutan dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

REFERENSI

- Hanafiah, S. N., Ruhendi, T. M., Sopiani, A. N., Dwinanda, V., Pangesti, I. O., Nur, A., Adela, S., Kusuma, S., Kamal, M. B., Rahayu, E., Farhan, M., & Goris, G. (2021). Exploring Key Elements of Public Governance. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, 56(1), 92–103.
- Moh. Pabundu Tika. (2020). Metodologi Riset Bisnis. *Jurnal IAIN Kudus*, 1–23.
- Hanafiah, S. N., Ruhendi, T. M., Sopiani, A. N., Dwinanda, V., Pangesti, I. O., Nur, A., Adela, S., Kusuma, S., Kamal, M. B., Rahayu, E., Farhan, M., & Goris, G. (2021). Exploring Key Elements of Public Governance. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, 56(1), 92–103.